



Badan Standardisasi Nasional
National Standardization Agency of Indonesia



Standard for Sustainable Development and Better Life

REFORMASI BIROKRASI

PENGUATAN PENGAWASAN

Heru Suseno, Yudrika Putra, Nila Yantrisiana, Testianto Hanung F.P

Jakarta, 5 September 2017



ELEMEN PENGUATAN PENGAWASAN

1. GRATIFIKASI
2. PENERAPAN SPIP
3. PENGADUAN MASYARAKAT
4. WBS
5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
6. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
7. APIP

GRATIFIKASI

1	Gratifikasi (1,5)	Bukti
	a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	Perka BSN Nomor 5 Tahun 2014 ttg Sistem Pengendalian Gratifikasi beserta perubahannya
	b. Telah dilakukan public campaign	Sosialisasi, publikasi di Web, Infografis penanganan gratifikasi, brosur/flyer.
	c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Laporan Hasil Evaluasi
	d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Pembahasan dengan KPK, Laporan Hasil Evaluasi
	e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Laporan Hasil Evaluasi, dokumentasi barang gratifikasi

PENERAPAN SPIP

2	Penerapan SPIP (1,5)	Bukti
	a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP	SK Tim Satgas SPIP terbaru, Perka BSN Grand desain SPIP, Perka 1/2017
	b. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian unit kerja, Maturitas SPIP
	c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja
	d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja
	e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Sosialisasi SPIP, Bimtek SPIP oleh BPKP
	f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Laporan hasil pemantauan per semester

PENGADUAN MASYARAKAT

3	Pengaduan Masyarakat (2)	Bukti
	a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Perka BSN Nomor 2 Tahun 2015 ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat beserta dengan perubahannya
	b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIPMAS), Laporan Hasil Evaluasi
	c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan Hasil Evaluasi
	d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Hasil Evaluasi
	e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan Hasil Evaluasi

WHISTLE BLOWING SYSTEM

4	Whistle-Blowing System (1,5)	Bukti
	a. Telah terdapat Whistle Blowing System	Perka BSN Nomor 5 Tahun 2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)
	b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan	Sosialisasi 4 Perka (dokumentasi, materi, buku saku)
	c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan	Laporan Hasil Evaluasi
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System	Laporan Hasil Evaluasi
	e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Laporan Hasil Evaluasi

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)	Bukti
	a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan	Perka BSN Nomor 1 Tahun 2015 ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Sosialisasi 4 Perka (dokumentasi, materi, buku saku)
	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Laporan hasil pemantauan per semester
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Hasil Evaluasi
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan Hasil Evaluasi

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)	Bukti
	a. Telah dilakukan pencaanangan zona integritas	Berita di Web BSN dan Dokumen pakta integritas masing-masing unit kerja
	b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi ZI/WBK atas seluruh unit kerja
	c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas	PKPT, SK Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM, RAB ,TOR,Rencana kerja ZI WBK/WBBM, Penilaian awal ZI WBK/WBBM, Monitoring ZI WBK/WBBM, Rapat koordinasi ZI WBK/WBBM, dan Sosialisasi ZI WBK/WBBM.
	d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	Laporan Hasil Evaluasi atas Unit Kerja yang diusulkan dan ditetapkan berpredikat ZI WBK/WBBM
	e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”	Hasil penetapan unit kerja berpredikat WBK oleh Kemenpan RB

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)	Bukti
	a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	Piagam Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit (Internal), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Eksternal), Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKAKL
	b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.	Sertifikat Auditor, Sertifikat Diklat Teknis Substansi, Sertifikat keahlian.
	c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
	d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	Audit focus pada Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja.

INDONESIA BISA!!!



TERIMA KASIH THANK YOU



BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Komite Akreditasi Nasional

Members of



Members of



www.bsn.go.id

www.kan.or.id